

PENGARUH PENDAPATAN DAERAH DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG

Rita Irviani

STMIK Pringsewu Lampung
rita_irviani@yahoo.com

Citrawati Jatiningrum

STMIK Pringsewu Lampung
citrawati1980@gmail.com

Kasmi

STMIK Pringsewu Lampung
kasmie@gmail.com

ABSTRACT

Regional income is one of the important factors in the implementation of government wheels and become one of the important benchmarks in the implementation of regional autonomy. This study aims to test empirically the relationship between regional revenue and financial performance on Economic Growth and Economic Welfare in the Regency/City Lampung Province. The data used are data of regencies/cities in Lampung Province 2014-2016. By using Panel method with fixed method, the result was significant influence between regional income and financial performance to growth economic and welfare society. Empirical evidence indicates that although all regional income variables are influential, the regional restitution has no significant effect on the Welfare of the Community in Lampung Province.

Keywords: *Economic Growth, Welfare Society, Regional Income*

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing wilayah juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Samuelson dan Nordhaus (2004) menjelaskan bahwa salah satu indikator makro keberhasilan pembangunan diantaranya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah. Sehingga pembangunan merupakan suatu rangkaian proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator utama dalam pembangunan

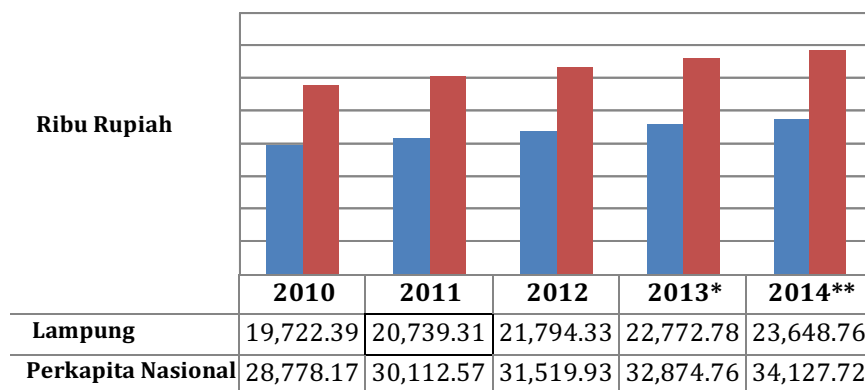
wilayah meliputi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan dapat menggambarkan capaian kinerja pembangunan wilayah secara umum. Tewuh (2014) menjelaskan bahwa berdasarkan pada prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional, memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme.

Pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung terus mengalami penurunan selama periode 2011– 2014. Selama

kurun waktu 2011-2014 kinerja perekonomian Provinsi Lampung memiliki laju pertumbuhan rata-rata 5,97 persen, lebih kecil dari rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,90 persen (*BPS provinsi Lampung, 2015*).

Melambatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan laju pertumbuhan pada sektor-sektor yang mendominasi relatif lebih rendah dibandingkn pertumbuhan sektor lainnya.

Tabel 1
PDRB Perkapita ADHB



Sumber: BPS Provinsi Lampung 2015

Tabel 1 diperoleh dari data analisis Provinsi Lampung 2015 menunjukkan angka PDRB Provinsi Lampung mengalami penurunan, namun selama kurun waktu 2010-2014 pendapatan per kapita di Provinsi Lampung cenderung meningkat. Namun, peningkatan tersebut lebih rendah dari pendapatan per kapita nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pergerakan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita Provinsi Lampung dan pendapatan per kapita Nasional.

Pendapatan daerah berhubungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan Masyarakat dinilai

menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu ukuran tunggal dan sederhana yang memuat tiga aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Ketiga komponen IPM tersebut dapat menunjukkan tingkat pembangunan manusia suatu wilayah melalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak. Berikut ini adalah data IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Suciati, et al. 2013).

Tabel 2
Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Ranking
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2013-2014

No.	Kabupaten/Kota	IPM		Ranking	
		2013	2014*)	2013	2014*)
1	Lampung Barat	70.17	70.37	12	13
2	Tanggamus	72.32	72.66	4	4
3	Lampung Selatan	70.95	71.25	9	10
4	Lampung Timur	71.64	72.14	6	6
5	Lampung Tengah	71.81	72.30	5	5
6	Lampung Utara	71.28	71.70	8	8
7	Way Kanan	70.84	71.08	11	11
8	Tulang Bawang	71.60	71.86	7	7
9	Pesawaran	70.90	71.25	10	9
10	Pringsewu	72.80	73.22	3	3
11	Mesuji	68.30	68.79	14	14
12	Tulang Bawang Barat	69.82	70.38	13	12
13	Pesisir Barat	N/A	68.43	N/A	15
14	Bandar Lampung	76.83	77.17	2	2
15	Metro	77.30	77.53	1	1
	Lampung	72.45	72.87	20	21

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Metro 2015

Berdasarkan hasil penghitungan tabel diatas, Kota Metro memiliki nilai IPM tertinggi dibandingkan dengan 15 (lima belas) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung dengan nilai IPM 77,53 pada tahun 2013, yang tertinggi berikutnya adalah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pringsewu dengan nilai IPM nya masing-masing 77,17 dan 73,22. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki nilai IPM terendah yaitu Kabupaten Pesisir Barat dengan nilai IPM sebesar 68,43. Dari data ini dapat memberikan indikasi bahwa daerah yang memiliki fasilitas pendidikan yang tinggi, mempunyai akses yang mudah dengan daerah lain, dan sebagai pusat perdagangan dan jasa akan memiliki nilai IPM yang tinggi. Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah. Dalam perspektif ini, pemerintah daerah (pemda) diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (Sidik,

2002). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pendapatan Daerah daerah dalam era desentralisasi fiskal di Indonesia mencakup Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU). Desmawati et. al. (2015) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi juga mempunyai dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dimana PAD idealnya menjadi sumber utama biaya pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan daerahnya. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Beberapa penelitian membuktikan bahwa Kinerja ekonomi yaitu derajat desentralisasi keuangan dan kemandirian ekonomi secara tidak langsung berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi ketergantungan keuangan, secara tidak langsung berpengaruh negatif (Sularso dan Restianto, 2011; Arsa dan Setiawina, 2015).

Penelitian ini penting dilakukan untuk menguji dan menganalisis adanya peningkatan atau penurunan Pendapatan Daerah di Provinsi Lampung yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi yang meningkat akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung. Sehingga Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di daerah setempat. Dengan optimalisasi pendapatan Daerah maka diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris: *Pertama*, menguji secara empiris pengaruh pendapatan daerah dan kinerja pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/ Kota Provinsi Lampung. *Kedua*, menguji secara empiris pengaruh pendapatan daerah dan kinerja pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/ Kota Provinsi Lampung.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pendapatan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki. Salah satu faktor yang dapat mendorong semakin tingginya kemampuan keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Saragih (2008) mengemukakan bahwa kenaikan PAD merupakan eksekusi dari pertumbuhan ekonomi. Bappenas (2004) juga menyatakan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif pada pertumbuhan ekonomi. Arsa dan Setiawina (2015) membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi efektif dalam meningkatkan pertumbuhan PAD atau pertumbuhan ekonomi sudah menyebar di sektor ekonomi yang merupakan sumber penerimaan Desmawati et al. (2015) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi juga mempunyai dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana PAD idealnya menjadi sumber utama biaya pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan daerahnya. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Hal ini seharusnya membuat pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait pajak ataupun retribusi. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan PAD. Basri et al. (2013) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan selalu menjadi sumber untuk meningkatkan penerimaan PAD, oleh karena itu perlu terus diupayakan

percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan bermanfaat bagi peningkatan PAD. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata terutama pada sektor-sektorekonomi yang berhubungan erat dengan penerimaan PAD.

Kinerja Keuangan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Pertumbuhan Ekonomi

IPM adalah salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah yang menggambarkan kombinasi antara tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan standar hidup layak (dengan ukuran ketimpangan antar wilayah). Dalam penelitian ini digunakan IPM sebagai acuan untuk menentukan tingkat kesejahteraan dalam bentuk ranking kesejahteraan suatu daerah. (Suciati et al, 2013) Dalam penelitian Setyowati (2012) dinyatakan bahwa IPM dipengaruhi oleh DAU, DAK dan PAD melalui Belanja Modal, dan IPM dipengaruhi Belanja Modal sedangkan Pertumbuhan Ekonomi tidak berdampak pada IPM melalui Belanja Modal. Hasil penelitian Sularso dan Restianto (2011); Arsa dan Setiawina (2015) membuktikan bahwa secara tidak langsung adanya pengaruh antara pendapatan daerah kinerja keuangan melalui pertumbuhan ekonomi. Demikian pula, peningkatan pendapatan akan meningkatkan berbagai pilihan dan kemampuan yang dinikmati oleh rumah tangga dan pemerintah, serta

pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pembangunan manusia. Salah satu tujuan pelaksanaan desentralisasi adalah dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Konsekuensi dari desentralisasi tersebut berdasarkan titik tolak desentralisasi di Indonesia yaitu Daerah Tingkat II, dengan pertimbangannya bahwa pemerintah kabupaten lebih lebih mengerti dan lebih paham pada kebutuhan dan potensi daerahnya

Hipotesis

Berdasarkan kajian teoritis dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dikembangkan pada penelitian ini adalah:

H1: Pendapatan Daerah dan Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

H2: Pendapatan Daerah dan Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat

METODE PENELITIAN

Data Penelitian

Data diperoleh dari dokumen resmi dari BPS Provinsi Lampung, dan data yang tidak dapat diperoleh melalui laman web diperoleh langsung melalui Dinas Pendapatan Daerah untuk Kabupaten/Kota, Berikut adalah tabel data Kabupaten/Kota provinsi Lampung tahun 2014-2016 pada penelitian ini, yaitu:

Tabel 3

Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
1	Lampung Barat	9	Pesawaran
2	Tanggamus	10	Pringsewu
3	Lampung Selatan	11	Mesuji
4	Lampung Timur	12	Tulang Bawang Barat
5	Lampung Tengah	13	Pesisir Barat
6	Lampung Utara		Kota/City:
7	Way Kanan	14	Bandar Lampung
8	Tulang Bawang	15	Metro

Berikut adalah data yang digunakan pada penelitian ini:

1. Data PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung
2. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Lampung
3. Data Realisasi Pajak Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung
4. Data Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung
5. Data Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung
6. Data Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota Provinsi Lampung
7. Data Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota Provinsi Lampung
8. Data Kesejahteraan Masyarakat menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

Definisi Operasional

Tabel 4
Definisi Operasional

VARIABEL INDEPENDEN	Definisi Operasional
X1= Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Menurut UU No 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
X2 = Pajak Daerah	Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
X3= Retribusi Daerah	Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. a. Retribusi Jasa Umum , b. Retribusi Jasa Usaha, c. Retribusi Perizinan Tertentu
X4 = Dana Perimbangan	Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
X5= Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memerhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi .
X6.= Dana Alokasi Khusus (DAK)	Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No.30 tahun 2007 penggunaan dana perimbangan khususnya dana alokasi khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk menandai kebutuhan fisik, sarana, dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan –peraturan perundang-undangan.
X7= Dana Alokasi Umum (DAU)	adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk Provinsi dan kabupaten/kota yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal dan potensi daerah.

KINERJA

KEUANGAN

X8= Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung dengan formula PAD dibagi dengan total pendapatan daerah dikalikan 100% (BPKP, 2012).

X9=

Ketergantungan Keuangan

Ketergantungan keuangan dihitung dengan formula Pendapatan Transfer dibagi dengan total pendapatan daerah dikalikan 100% (BPKP, 2012).

X10= Kemandirian Keuangan

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

b. Variabel Dependen, yaitu

Y1 = Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini adalah PDRB (Pendapatan Daerah Regional Bruto) atas dasar harga konstan. **Y2 = Kesejahteraan Masyarakat** dalam penelitian ini menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) sebagai indikator kesejahteraan Masyarakat.

Teknik Analisis

Pada penelitian ini, digunakan data sekunder berupa data panel. Data tersebut merupakan gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*). Data panel atau *pooled data* merupakan kombinasi dari data time series dan cross section. Dengan mengakomodasi informasi baik yang terkait dengan variabel-variabel cross section maupun timeseries, data panel secara substansial mampu menurunkan masalah comitted-variables, model yang mengabaikan variabel yang relevan (Wibisono, 2005). Untuk mengatasi interkorelasi di antara variable-variabel bebas yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak tepatnya penaksiran regresi, metode data panel lebih tepat untuk digunakan (Griffiths, 2001)

Terdapat tiga metode data panel yaitu pendekatan Pooled Least Square model atau PLS dan dikenal pula dengan pendekatan *common effect model*, pendekatan efek tetap (*fixed effect*

model), dan pendekatan efek acak (*random effect model*). Selanjutnya untuk pemilihan model yang tepat yang akan digunakan dalam mengestimasi model regresi dengan menggunakan data panel, dilakukan dengan membandingkan hasil regresi ketiga metode tersebut. Untuk pemilihan model yang tepat yang akan digunakan dalam analisis data panel, maka dilakukan dengan pengujian statistik yaitu melalui Uji Hausman Test.

Model Regresi

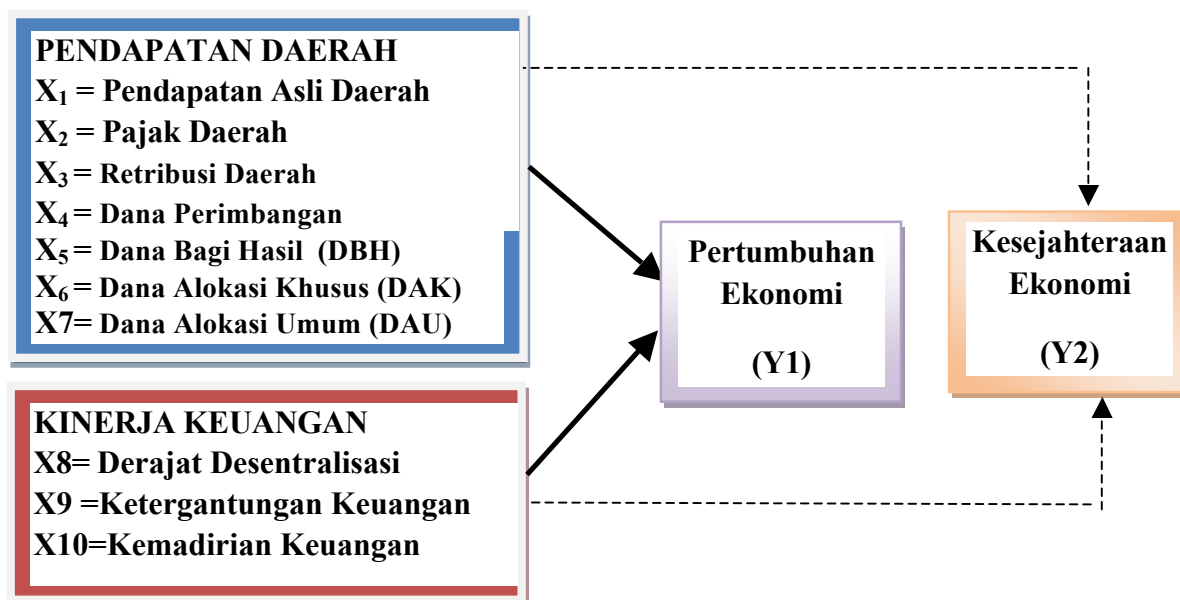
Hasil perhitungan analisis *Ordinary Least Square (OLS)*, ini secara bertahap dianalisis melalui model persamaan regresi sebagai berikut:

- 1) **Model 1:** Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1), Pajak Daerah (X2), Retribusi Daerah (X3) Dana Perimbangan (X4), Dana Bagi Hasil (X5), Dana Alokasi Khusus (X6), Dana Alokasi Umum (X7) Derajat Desentralisasi (X8), Ketergantungan Keuangan(X9), Kemandirian Keuangan (X10) pada Pertumbuhan Ekonomi (Y₁)
- 2) **Model 2:** Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1), Pajak Daerah (X2), Retribusi Daerah (X3) Dana Perimbangan (X4), Dana Bagi Hasil (X5), Dana Alokasi Khusus (X6), Dana Alokasi Umum (X7), Derajat Desentralisasi (X8), Ketergantungan Keuangan(X9), Kemandirian Keuangan (X10) pada Kesejahteraan

Masyarakat (Y_2), tersaji sebagai berikut:

Tabel 5
Klasifikasi Model dan Persamaan Model

Model I	Variabel Independen	Variabel Dependen	Persamaan Model
1	X_1 = Pendapatan Asli Daerah X_2 = Pajak Daerah X_3 = Retribusi Daerah X_4 = Dana Perimbangan X_5 = Dana Bagi Hasil (DBH) X_6 = Dana Alokasi Khusus (DAK) X_7 = Dana Alokasi Umum (DAU) X_8 = Derajat Desentralisasi X_9 = Ketergantungan Keuangan X_{10} = Kemandirian Keuangan	Y_1 Pertumbuhan Ekonomi Y_2 Kesejahteraan Masyarakat	$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \beta_9 X_9 + \beta_{10} X_{10} + e$ $Y_2 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \beta_9 X_9 + \beta_{10} X_{10} + e$



Gambar 1 Skematik Model Penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Hausman test

Uji Statistik *Hausman test* yaitu *Chi square* yang digunakan untuk menentukan antara metode *Random Effect* atau *Fixed Effect* sebagai metode untuk melakukan analisis data panel. Adapun hipotesis dalam pengujian *chi*

square sebagai berikut; H_0 : *Random Effect*

H_1 : *Fixed Effect Model*. Statistik *Hausman* mengikuti distribusi statistik *Chi Square* dengan degree of freedom sebanyak variable bebasnya. Jika dari hasil pengujian di *Chi Square statistic* > *Chi Square Tabel*, dan *p-value signifikan*, maka Hipotesis H_0 ditolak sehingga metode *Fixed Effect* lebih tepat

untuk mengestimasi data panel. Sebaliknya jika $Chi\ Square\ statistic < Chi\ Square\ Tabel$, dan $p\ value$ tidak signifikan, maka hipotesis H_0 diterima sehingga akan lebih baik untuk menggunakan Random Effect dalam mengestimasi data panel.

Tabel 6

Hasil uji Chi Square (Hausman Test)

MODEL	Chi square statistik	df	Asymp.Sig (2 tailed) / P value
1	147.63 ^a	10	0.000
2	134.84 ^a	10	0.000
3	144.77 ^a	11	0.000

Tabel 6 menunjukkan bahwa H_0 ditolak, atau pengujian panel data menggunakan *Fix effect*. Hasil Uji Chi square dapat dilihat bahwa nilai $p\ value$ adalah sebesar 0.000 atau lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ yang berarti H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa metode *Fixed Effect* yang merupakan metode analisis yang dipilih untuk digunakan.

Pengujian Regresi Pengaruh Pendapatan Daerah Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Hasil uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Dari hasil regresi pengaruh pendapatan daerah dan Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Kabupaten/Kota di Lampung tahun 2014-2016 diperoleh nilai R^2 sebesar 0.458 Hal ini berarti sebesar 45,8 persen variasi tingkat Pertumbuhan Ekonomi dapat dijelaskan oleh 10 variabel independen (15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung). Sedangkan sisanya

sebesar 54,2 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain atau variable-variabel lain diluar model. Dengan demikian secara umum model yang dipergunakan ini dapat dikatakan cukup baik untuk menjelaskan pengaruh pendapatan daerah dan kinerja keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung.

Hasil uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil regresi pengaruh pendapatan daerah dan kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur menggunakan PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2014-2016 dengan menggunakan taraf keyakinan 95 persen ($\alpha=0.05$), diperoleh $p\ value$ 0,000, dengan F stat = 11.35627. Dari hasil regresi diperoleh dapat disimpulkan bahwa variable pendapatan daerah dan kinerja keuangan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel pendapatan daerah dan kinerja ekonomi secara individual dalam menerangkan variasi pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Berikut adalah tabel hasil analisis regresi:

Tabel 7
Hasil uji Statistik t Pendapatan Daerah dan Kinerja Keuangan terhadap
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

<i>Variabel Indeenden</i>	Beta	t- value	Sig (p-value)
<i>Constant</i>	0.356	10.553	0.000***
<i>PAD</i>	0.234	2.564	0.000***
<i>PJKD</i>	0.204	1.635	0.001**
<i>RTBD</i>	0.085	3.489	0.002**
<i>DP</i>	0.230	2.286	0.001**
<i>DBH</i>	0.125	1.862	0.003**
<i>DAK</i>	0.342	2.665	0.000***
<i>DAU</i>	0.012	2.134	0.000***
<i>DD</i>	0.123	1.833	0.002**
<i>KK</i>	0.222	1.527	0.004**
<i>KMEK</i>	0.342	1.872	0.002**
N	45		

a. *Variabel dependen: PDRB*

*, **, ***Signifikansi pada level 10%, 5%, dan 1 %

Berdasarkan nilai probabilitas masing-masing variabel dan nilai signifikansi *p value* lebih kecil daripada *alpha* 0.05, maka dapat dikemukakan bahwa seluruh variabel pada pendapatan daerah dan kinerja ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Dengan kata lain bahwa pendapatan ekonomi dan kinerja keuangan efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini juga berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut sebagian besar didukung oleh sektor-sektor yang juga penyumbang utama PAD seperti sektor perdagangan, pertanian, pariwisata seperti hotel dan restoran. Sektor ekonomi yang secara langsung bisa meningkatkan penerimaan PAD seperti sektor industri dan perdagangan terutama berkaitan dengan penerimaan pajak dan distribusi daerah.

Pengujian Regresi Pengaruh Pendapatan Daerah Dan Kinerja Keuangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (IPM)

Hasil uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Dari hasil regresi pengaruh pendapatan daerah dan Kinerja Keuangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang diukur dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) adalah sebesar 0.346 Hal ini berarti sebesar 34,6 persen variasi tingkat Pertumbuhan Ekonomi dapat dijelaskan oleh 10 variabel independen (15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung). Sedangkan sisanya sebesar 56,4 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain atau variable-variabel lain diluar model. Dengan demikian secara umum model yang dipergunakan ini dapat dikatakan cukup baik untuk menjelaskan pengaruh pendapatan daerah dan kinerja keuangan terhadap kesejahteraan Manusia di Provinsi Lampung.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik F)

Pengujian terhadap pengaruh pendapatan daerah dan kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur menggunakan IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2014-2016 dengan menggunakan taraf keyakinan 95 persen (diperoleh *p value* 0,001, atau lebih kecil dari *alpha* ($\alpha=0.05$), F stat =

13.667. Dari hasil regresi diperoleh dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan daerah dan kinerja keuangan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Uji Signifikansi Parameter Individual

(Uji Statistik t)

Berikut ini adalah pengujian statistik pengaruh untuk masing-masing variabel pendapatan daerah dan kinerja ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang diukur menggunakan IPM

Tabel 8
Hasil uji Statistik t Pendapatan Daerah dan Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

<i>Variabel Independen</i>	Beta	t- value	Sig (<i>p-value</i>)
<i>Constant</i>	0.336	6.932	0.000***
<i>PAD</i>	0.264	4.869	0.000***
<i>PJKD</i>	0.204	2.645	0.001**
<i>RTBD</i>	0.405	0.989	0.082
<i>DP</i>	0.303	1.2576	0.011**
<i>DBH</i>	0.127	1.543	0.002**
<i>DAK</i>	0.242	4.635	0.000***
<i>DAU</i>	0.349	3.134	0.000***
DD	0.193	1.333	0.002**
KK	0.292	1.226	0.001**
KMEK	0.366	1.272	0.003**
N	45		

a. Dependen Var: IPM

*, **, ***Signifikansi pada level 10%, 5%, dan 1 %

Berdasarkan nilai probabilitas masing-masing variabel dan nilai signifikansi p value lebih kecil daripada α 0.05, namun untuk variabel retribusi daerah menunjukkan p value lebih dari α yaitu 0.082. Sehingga hasil menunjukkan bahwa seluruh variabel pada pendapatan daerah kecuali Retribusi Daerah dan masing-masing variabel kinerja ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. membuktikan bahwa retribusi daerah tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini member bukti bahwa retribusi daerah masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan pembayaran retribusi masyarakat nilainya masih relatif belum memenuhi angka yang diharapkan setiap

tahunnya, sehingga belum mampu menjadi kontribusi bagi pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan di kabupaten/kota propinsi Lampung.

Beberapa faktor penyebab retribusi daerah masih relatif rendah yaitu antara lain, baik pajak dan retribusi daerah yaitu apabila prosentasi tarif pembayaran dinaikkan akan terbentur dengan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), selain itu juga akan memberatkan wajib pajak daerah dan masyarakat yang memiliki kewajiban untuk membayar retribusi daerah. Ini berkebalikan dengan rencana dan keinginan dari pemerintah daerah yang relatif ingin menaikkan persentase pendapatan asli daerah setiap tahunnya melalui pajak dan retribusi daerah.

Menurut Undang - undang no 34 tahun 2000. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah di Propinsi Lampung mempunyai jumlah yang relatif berfluktuasi untuk setiap kabupaten/ kota setiap tahunnya, ini juga merupakan penyebab retribusi daerah akan tetapi belum memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat meskipun retribusi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Lampung. Arguentasi lain yang menjadi bukti empiris dari hasil penelitian ini ialah retribusi daerah pun masih dikelola lebih kecil dibanding pajak daerah. Sehingga masih belum optimalnya pengeolaan pendapatan daerah.

Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah dan kinerja keuangan pada kabupaten atau kota di Propinsi Lampung akan meningkatkan berbagai pilihan dan kemampuan yang dinikmati oleh rumah tangga dan pemerintah, serta pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan pembangunan manusia. Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator terciptanya pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Dewi & Ketut, 2014). Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah dan kinerja keuangan pada kabupaten atau kota di Propinsi Lampung akan meningkatkan berbagai pilihan dan kemampuan yang dinikmati oleh rumah

tangga dan pemerintah, serta pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan pembangunan manusia.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pengujian yang dilakukan menggunakan Data Panel yaitu fix method menunjukkan bahwa :

1. Pendapatan daerah dan kinerja ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Dengan kata lain bahwa pendapatan ekonomi dan kinerja keuangan efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel pada pendapatan daerah kecuali Retribusi Daerah dan masing-masing variabel kinerja ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

SARAN

1. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya kabupaten/Kota di Propinsi Lampung dan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, maka diperlukan kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang hal tersebut. Pemerintah daerah harus mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara merata.
2. Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang waktu penelitian dan menganalisis faktor-faktor lain yang secara efektif menunjang Pendapatan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsa, I. K. & Setiawina, N. D. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Bali Tahun 2006 S.D. 2013 *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 20 (2).
- Bappenas. 2004. Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah. *Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah*
- Basri, H., Syaparuddin, S., & Junaidi, J. 2013. Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 81-90.
- Biro Pusat Statistik. 2014. Berbagai Tahun. Pendapatan Domestik Regional Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung.
- Biro Pusat Statistik. 2015. Berbagai Tahun. *Pendapatan Daerah Provinsi Lampung*.
- Dewi, Made Yustiari dan I Ketut Sujana. 2014. "Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Pada Praktik Perataan Laba Dengan Jenis Industri Sebagai Variabel Pemoderasi Di BEI". ISSN 2302-8556. E-journal Akuntansi. Universitas Udayana. 170-184. Bali.
- Desmawati, A., Zamzami & Zulgani. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 3(1), Juli-September 2015. ISSN: 2338- 4603
- Griffith, Rachel & Stephen Redding & John Van Reenen, 2001. R&D and absorptive capacity: from theory to data, IFS Working Papers W01/03, Institute for Fiscal Studies.
- Samuelson P.A & Nordhaus, W.D. 2004. *Makro Ekonomi*. Edisi Keempatbels. Jakarta. Erlangga
- Setyowati, L. & Y.K. Suparwati. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai variabel intervening (Studi Empiris Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah). *Jurnal Prestasi*. 9(1), 113-133.
- Sidik, Machfud. 2002. Format Hubungan Keuangan pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional. Seminar Nasional Publik Sektor, April, Jakarta.
- Suciati, D. A. P., Sri B. M. K. & K Jayastra. 2013. Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan Dan Investasi Pada Kesejahteraan Masyarakat Melalui Belanja Langsung Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Working Paper*
- Sularso, H., & Restianto, Y.E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*. 1(2), 109-124.
- Tewuh G. A. J. 2014. Analisis Korelasi Pendapatan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Prestasi*. 13(1)
- Wibisono, 2005. Riset Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

